

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- D. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
- E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
- F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
- H. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- I. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah; dan
- J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 381/KMK.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Entitas Pelaporan

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatandalam catatan Entitas Pelapor akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan entitas pelaporan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset

lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan Barang Milik Negara.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Periode Laporan

Periode pelaporan/rekonsiliasi kepada KPKNL yaitu Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 pada laporan bulan Januari s.d Desember 2019.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara (BMN) Pada Tahunan Tahun Anggaran 2019 periode 31 Desember 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Bendahara Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2019 periode 31 Desember 2019 ini adalah sebesar Rp. 8.413.761.045,- (delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa Saldo Awal laporan sebesar Rp. 7.853.701.045,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat puluh lima rupiah) dengan nilai Mutasi Tambah yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) sebesar Rp. 560.060.000,- (lima ratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan nilai Mutasi Kurang yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan Nilai BMN Aset Tak Berwujud yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2019 periode 31 Desember 2019 ini

adalah sebesar Rp.116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa Saldo Awal Laporan Sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dengan nilai Mutasi Tambah yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dan nilai Mutasi Kurang yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Nilai Mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan yang merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan menggunakan Aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan barang persediaan;
3. Laporan aset tetap (intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan aset tak berwujud;
6. Laporan barang bersejarah;
7. Laporan kondisi barang;
8. Laporan penyusutan;
9. Laporan barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang;
10. Laporan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang;
11. Laporan barang bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBYS);
12. Catatan atas laporan barang milik negara;
13. Berita acara rekonsialisasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada pengelola barang;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN, dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019

1. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2019 menurut data pengelola BMN adalah sebesar Rp. 7.853.701.045,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 7.777.201.045,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat puluh lima rupiah), dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019

Mutasi BMN adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.78.444.400,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal persediaan sebesar Rp.265.700,- (dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp. 78.178.700,- (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Persediaan	265.700,-	78.178.700,-	78.444.400,-
JUMLAH			

b. Tanah

Saldo Tanah pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,-(nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal tanah seluas 0 m²dengan nilai sebesar Rp.0,-(nol rupiah),Mutasi Tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), dan Mutasi Kurangseluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah *tidak ada* bidang dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah)sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah *tidak ada* bidang dengan nilai sebesar Rp.0,-(nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah tidak ada.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Bawaslu RI, yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	0	0
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	0	0
Dikuasai pihak lain	0	0

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.8.404.386.045,- (delapan milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp.7.844.326.045,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), dengan Mutasi Tambah sebesar Rp. 560.060.000,- (lima ratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Akun Peralatan dan Mesin dengan perincian bidang barang sebagai berikut :

a) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.923.970.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp. 3.923.970.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Mutasi Tambah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan Mutasi Kurang jumlah barang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah)

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	3.923.970.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

b) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor (3.05.01) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 356.777.500,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar 337.277.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp 0,-(nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor (3.05.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	19.500.000,-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor (3.05.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak ada		

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah)

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	109	356.777.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

c) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga (3.05.02) pada Bawaslu Provinsi Banten Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.836.857.100,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), Saldo Awal Rp. 1.836.857.100,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga (3.05.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga (3.05.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Alat Rumah Tangga (3.05.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

Dari jumlah Alat Rumah Tangga (3.05.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	677	1.836.857.100
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

d) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio (3.06.01) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 232.055.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), Saldo Awal Rp 232.055.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio (3.06.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Mutasi Kurang Alat Studio (3.06.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	29	232.055.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

e) Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi (3.06.02) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 17.684.300,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), Saldo Awal Rp. 17.684.300,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi (3.06.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Mutasi Kurang Alat Komunikasi (3.06.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Alat Komunikasi (3.06.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

Dari jumlah Alat Komunikasi (3.06.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	17.684.300
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

f) Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit (3.10.01) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.674.325.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saldo Awal Rp 1.218.725.000,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp. 455.600.000,- (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer Unit (3.10.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	455.600.000,-	-

Mutasi Kurang Komputer Unit (3.10.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	163	1.674.325.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

g) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer (3.10.02) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 362.717.145,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), Saldo Awal Rp 277.757.145,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat lima rupiah) dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.84.960.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	84.960.000,-	-

Mutasi Kurang Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	-	-

Dari jumlah Peralatan Komputer (3.10.02) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah tidak ada kuantitas dengan nilai sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Komputer (3.10.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	81	362.717.145
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Laporan Intrakomptabel adalah sebesar Rp. 3.817.476.750,- (tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Laporan Ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan Laporan Gabungan adalah sebesar Rp. 3.840.776.750,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

d. Jaringan

Saldo Jaringan pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Mutasi Tambah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

1) Rincian Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a) Instalasi Lain-lain (5.03.10)

Saldo Instalasi Lain-lain (5.03.10) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Saldo Awal Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan Mutasi Tambah sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Instalasi Lain-lain (5.03.10) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak ada	-	-

Mutasi Kurang Instalasi Lain-lain (5.03.10) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak ada	-	-

Dari jumlah Instalasi Lain-lain (5.03.10) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak tidak ada kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Dari Instalasi Lain-lain (5.03.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	9.375.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

e. Software

Saldo Software pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebesar Rp.0,- (nol rupiah), Mutasi Tambah sebesar Rp. 116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah), dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

1) Rincian Software per bidang barang adalah sebagai berikut:

a) Aset Tak Berwujud (8.01.01)

Saldo Aset Tak Berwujud (8.01.01) pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah), Saldo Awal Rp.0,- (nol rupiah), dengan Mutasi Tambah sebesar Rp. 116.446.082,- (seratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud (8.01.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	84.960.000,-	-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud (8.01.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak ada	-	-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud (8.01.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak tidak ada kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Dari Aset Tak Berwujud (8.01.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8	116.446.082
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Software

Akumulasi Penyusutan Software pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp.27.236.520,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

3. Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahun Anggaran 2019

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 8.530.274.627,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	78.444.400	0,00	-	-	78.844.400	0,00
	Sub Jumlah (1)	78.844.400	0,00	-	-	78.844.400	0,00
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	8.327.886.045	98,51	76.500.000	100	8.404.386.045	98,52
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	0,11	-	-	9.375.000	0,11
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	8.337.261.045	98,62	76.500.000	100	8.413.761.045	98,63
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	116.446.082	1,38	-	-	116.446.082	1,37
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	116.446.082	1,38	-	-	116.446.082	1,37
	Total	8.532.151.527	100	76.500.000	100	8.608.651.527	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahunan Tahun Anggaran 2019 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	(3.817.476.750)	99,05	(23.300.000)	100	(3.840.776.750)	99,06
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.375.000)	0,24	-	-	(9.375.000)	0,24
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (I)	(3.826.851.750)	99,29	(23.300.000)	100	(3.850.151.750)	99,30
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset tak Berwujud	(27.236.520)	0,71	-	-	(27.236.520)	0,70
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)	(27.236.520)	0,71	-	-	(27.236.520)	0,70
	Total	(3.854.088.270)	100	(23.300.000)	100	(3.877.388.270)	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	78.444.400	78.444.400	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	8.404.386.045	8.404.386.045	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	9.375.000	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	116.446.082	116.446.082	-
9	Aset Lain-lain*)	-	-	-
		8.532.151.527	8.532.151.527	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Periode TA 2017	2.538.321.045	133.691.745	5,27
2	Periode TA 2018	7.844.326.045	5.306.005.000	64,07
3	Periode TA 2019	8.404.386.045	560.060.000	6,66

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Bawaslu Provinsi Banten pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	8.254.226.045	135.160.000
3	Gedung & Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.0000	0
5	Aset tetap lainnya	116.446.082	15.000.000
Jumlah		8.380.047.127	150.160.000

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Baru terbentuknya Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, maka masih terkendala dengan persoalan pengamanan Barang Milik Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- b. Kurangnya Bimtek petugas SIMAK-BMN tentang penatausahaan Barang Milik Negara baik petugas yang didaerah maupun petugas yang di pusat;
- c. Masih adanya temuan BPK dalam pemeriksaan aset pada laporan Barang Milik Negara.

4. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- b. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- c. Meningkatkan keikutsertaan petugas SIMAK-BMN dalam acara bimbingan teknis sistem pengendalian internal dan penertiban pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- d. Menuntaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK terkait pengelolaan BMN dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban, pengadaan dan penggunaan, pengendalian dan pengawasan, serta penyusunan pelaporan.

Serang, 31 Desember 2019

**Penanggungjawab UAKPB
KEPALA SEKRETARIAT**



DIDI HADIYATNA